

ANALISIS FAKTOR SERAPAN TENAGA KERJA DI KAWASAN PENGEMBANGAN SEGITIGA REBANA

ANALYSIS OF LABOR ABSORPTION FACTORS IN REBANA TRIANGLE AGLOMERATION AREA

Hadi Ferdianysah
Bappelitbangda Kabupaten Sumedang
Jl Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang, 45323
daanhadi@gmail.com

Abstract

The West Java Provincial Government targets 4.3 million workers to be absorbed in the REBANA Triangle Area Development. To strengthen this plan, it is necessary for a study that analyzes the factors influencing the absorption of labor in West Java Province and especially in the REBANA Triangle area. Therefore, the analysis in this study uses on the time dimension before the planning of the REBANA Triangle Area Development. The purpose of this study was to analyze the effect of Gross Fixed Capital Formation (PMTB), Regency/City Minimum Wage (UMK), Regional Expenditures (ABD), and Education Index (IP) on labor absorption in Regencies/Cities in the REBANA Triangle Area in the period 2011-2019. Similarly, the effect of labor absorption in all regencies/cities in West Java Province is analyzed with the same factors and period. The results of this analysis and comparison are expected to serve as a reference and review of macro policies to increase labor absorption in the REBANA Triangle Area. The research was conducted using panel data regression analysis model. Based on the results of panel data analysis using the model Generalized Least Square, it was found that labor absorption in all regencies/cities in West Java was significantly influenced by PMTB, UMK, ABD, and IP factors. Meanwhile, the absorption of labor for all regencies/cities in the REBANA Triangle Area is only significantly affected by the ABD and IP factors.

Keywords : REBANA Triangle, labor absorption factors.

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 4,3 juta jiwa tenaga kerja dapat terserap dalam Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA. Untuk menguatkan perencanaan tersebut, kiranya diperlukan kajian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dan khususnya di wilayah Segitiga REBANA. Oleh karena itu analisis pada kajian ini memakai dimensi waktu sebelum adanya perencanaan Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan faktor-faktor makro yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara Kabupaten/Kota pada Kawasan Segitiga REBANA dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2011-2019. Faktor-faktor tersebut antara lain Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Daerah (ABD) dan Indeks Pendidikan (IP). Hasil dari analisis dan komparasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan telaahan kebijakan makro untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Kawasan Segitiga REBANA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data panel dengan model *Generalized Least Square* diperoleh hasil bahwa serapan tenaga kerja seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor PMTB, UMK, ABD dan IP. Sedangkan pada penyerapan tenaga kerja seluruh Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA hanya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor ABD dan IP.

Kata kunci: Segitiga REBANA, faktor-faktor penyerapan tenaga kerja

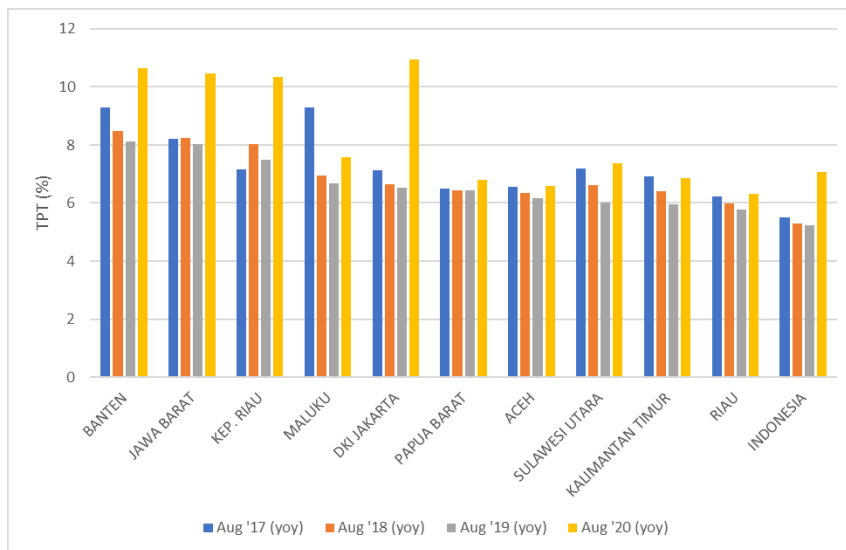
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia hingga saat ini masih belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun

2019 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat sebesar 6,32% dan semakin meningkat pada tahun 2020 sebesar 7,07% sebagai dampak Pandemi Covid-19 (BPS, 2020). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Provinsi Jawa Barat merupakan

satu dari 10 provinsi di Indonesia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi. Hal ini menjadi ironi, mengingat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang terkategori maju di Indonesia dan memiliki penduduk terbanyak.

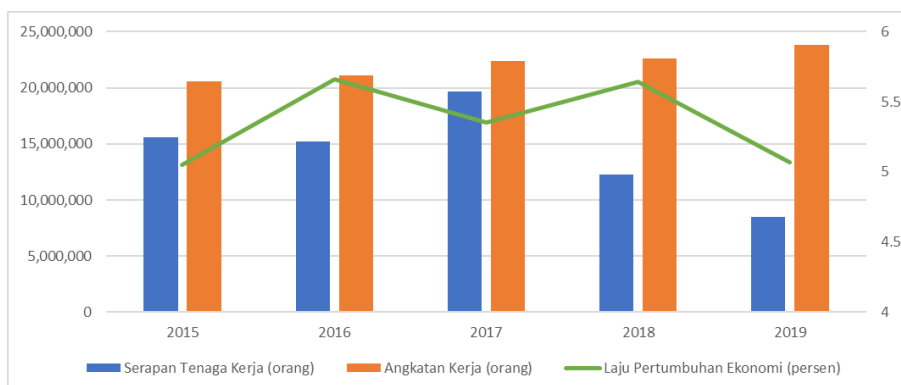


Gambar 1. Sepuluh provinsi di Indonesia yang Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi

Sumber : (BPS, 2020)(diolah)

Disebutkan dalam Bab II Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal P- RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, indikator lain yang menunjukkan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat adalah Persentase Serapan Tenaga Kerja. Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Persentase Serapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Sedangkan pada sisi lain jumlah

angkatan kerja semakin meningkat seiring pertambahan penduduk. Bahkan pada Gambar 2 terlihat bahwa Presentase Serapan Tenaga Kerja terlihat menurun di Tahun 2018 pada saat terjadinya percepatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertolak belakang dengan konsep penyerapan tenaga kerja, dimana permintaan akan tenaga kerja akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi akibat berkembangnya sektor-sektor usaha yang dapat menentukan daya serap tenaga kerja.



Gambar 2. Indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat

Sumber : Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (diolah)

Pada Bab IV Ranwal P- RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa salah upaya konkret untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Jawa Barat adalah melalui pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati (REBANA). Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA ini diharapkan dapat mengkaselerasi pembangunan di Utara - Timur Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memproyeksikan bahwa Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA ini akan menyerap 4,3 juta tenaga kerja yang sangat diharapkan warga terdampak COVID-19.

Rencana Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA menawarkan keunggulan konektivitas dengan didukung infrastruktur transportasi dan kedekatan dengan Ibukota Negara (Sofyan, 2019). Metropolitan REBANA semakin dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur yang paling solid dan terpadu baik. Infrastruktur tersebut antara lain Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Akses Aerocity Kertajati, Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, Kereta Bandara, dan Double Track Jakarta-Surabaya. Selain itu pada Kawasan Segitiga REBANA akan dikembangkan sejumlah kota dan kawasan industri baru (Bisnis.Com, 2020).

Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA untuk meningkatkan investasi di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja. Menurut Lewis dalam Todaro dan Smith (2003) investasi di sektor industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan meningkatkan output sehingga membutuhkan penambahan tenaga kerja. Pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor yang lebih modern (industri) juga akan meningkatkan output yang tentunya juga akan meningkatkan serapan tenaga kerja. Studi yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2017); Effendi (2014); dan Rahmania dkk. (2019) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama yang didorong oleh investasi berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga kerja.

Buchari (2016) menyatakan bahwa faktor lainnya yang mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas output yang diproduksi oleh produsen dan hal ini akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Atas dasar tersebut Tirtahardja dan Sulo (2005) menjelaskan bahwa pendidikan dalam rangka penyiapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai upaya untuk membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan dasar untuk bekerja yang terdiri atas pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Namun beberapa hasil penelitian diantaranya Suaidah dan Cahyono (2013), Susanto dkk (2018) dan Nurcholis (2014) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pendidikan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran di berbagai wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu dalam upaya menyerap tenaga kerja pada Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA, dicantumkan dalam Ranwal P- RPJMD Provinsi Jawa Barat strategi untuk menciptakan kolaborasi bersama industri yang nantinya berbisnis di Kawasan Segitiga REBANA untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah melalui SMK Juara. Hal ini merupakan inovasi layanan pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Implementasi strategi program ini adalah penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri serta pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kegiatan strategis lainnya adalah memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan masyarakat lokal Kawasan Segitiga REBANA agar dapat terserap industri atau menjadi wirausaha yang mampu memanfaatkan peluang.

Tentunya Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA merupakan ajang pembuktian implementasi otonomi daerah yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sasana (2012) menyatakan bahwa di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan adanya kewenangan ini diharapkan terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan

permasalahan dan potensi setiap daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ziyadaturrofiqoh (2019) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah penentuan upah tenaga kerja. Disebutkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 bahwa keunggulan komparatif Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA adalah upah tenaga kerja yang lebih rendah dibanding daerah industri lain di Jawa Barat. Rata-rata UMK di Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai Rp2.963.497,40. Sementara itu, UMK Kabupaten Indramayu mencapai Rp2.297.931,11; Kabupaten Majalengka Rp1.944.166,36; Kabupaten Cirebon Rp2.196.416,09; Kabupaten Sumedang Rp3.139.275,37; dan Kabupaten Subang Rp2.965.468,00.

Wihastuti dan Rahmatullah (2018) menyatakan bahwa masalah penyerapan tenaga kerja erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Beberapa penelitian diantaranya Sulistiawati (2012), Panjawa dan Soebagiyo (2014), Wihastuti dan Rahmatullah (2018) dan Ziyadaturrofiqoh dkk. (2019) menunjukkan kenaikan upah berdampak negatif terhadap penyerapan

tenaga kerja yang sejalan dengan teori upah. Sementara itu penelitian Hartono dkk. (2018); Indradewa dan Natha (2015) menunjukkan adanya hubungan positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja, dimana kenaikan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil.

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis bahwa Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA dapat meningkatkan serapan tenaga kerja di Jawa Barat. Tentunya hal ini akan membidik target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai salah satu indikator makro daerah Provinsi Jawa Barat.

Namun untuk mendukung perencanaan tersebut, perlu kiranya dilakukan sebuah kajian yang menganalisis faktor-faktor makro yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dan lebih khusus pada Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA. Analisis ini dilihat dari perspektif sebelum adanya Perencanaan Pengembangan Segitiga REBANA ini. Faktor-faktor makro yang dimaksud adalah investasi, tingkat pendidikan penduduk, UMK dan belanja daerah. Hal inilah yang menjadi pendekatan masalah pada kajian ini.

Pemilihan faktor-faktor tersebut dikarenakan dibahas dalam dokumen perencanaan Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA sebagai permasalahan, potensi, strategi dan kebijakan. Pemilihan keempat faktor ini juga diperkuat oleh beberapa kajian sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa investasi, tingkat pendidikan penduduk, UMK dan belanja daerah adalah faktor-faktor makro yang mempengaruhi serapan tenaga kerja di suatu wilayah. Resume kajian/penelitian terdahulu mengenai empat faktor makro yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Resume Kajian/Penelitian Terdahulu

No	Kajian/Penelitian sebelumnya	Faktor yang berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja			
		Investasi	UMK	Pendidikan	Belanja daerah
1	Sulistiawati (2012),	-	Berpengaruh negatif dan signifikan	-	-
2	Suaidah dan Cahyono (2013)	-	-	Berpengaruh negatif dan signifikan	-
3	Effendi (2014)	Berpengaruh positif dan signifikan	Berpengaruh negatif dan signifikan	-	-
4	Nurcholis (2014)	-	Berpengaruh positif dan signifikan	-	Berpengaruh negatif dan signifikan
5	Indradewa dan Natha (2015)	Berpengaruh positif dan signifikan	Berpengaruh positif dan signifikan	-	-
6	Wihastuti dan Rahmatullah (2018)	-	Berpengaruh negatif dan signifikan	-	-
7	Hartono dkk. (2018)	Berpengaruh positif dan signifikan	Berpengaruh negatif tapi tidak signifikan	-	-
8	Ziyadaturrofiqoh (2019)	Berpengaruh positif dan signifikan	Berpengaruh negatif tapi tidak signifikan	-	Berpengaruh negatif tapi tidak signifikan

Sumber : Hasil studi literatur, 2021

Maka kerangka pemikiran kajian ini adalah mencoba untuk menganalisis apakah faktor-faktor makro yang diurai diatas nyata mempengaruhi serapan tenaga kerja di Jawa Barat terutama sebelum adanya Perencanaan Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA. Sehingga hasil yang diperoleh dari analisis ini dapat memperkuat dan memberikan rekomendasi terhadap Perencanaan Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA.

Berangkat dari kerangka pemikiran diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah investasi, UMK, tingkat pendidikan penduduk dan belanja daerah berpengaruh terhadap Penyerapan Serapan Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten Kota Jawa Barat dan Kabupaten Kota di Kawasan Segitiga REBANA. Dimensi waktu yang dianalisis pada kajian ini adalah periode tahun 2011-2019, dengan asumsi belum adanya Perencanaan Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA.

METODE

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan salah satu metode

analisis regresi liner berganda yaitu data panel yang mengkombinasikan antara metode analisis *time series* dan *cross section* (Gujarati, 2004).

Adapun definisi operasional variabel yang dipilih berdasarkan uraian di pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sebagai variabel terikat. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Data penyerapan tenaga kerja seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2011-2019 diperoleh dari Buku Kabupaten/Kota dalam Angka yang dirilis oleh setiap BPS Kabupaten/Kota.
2. Investasi (PMTB) sebagai variabel bebas ke-1. Pada kajian ini pendekatan data investasi adalah dengan menggunakan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dapat diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang modal dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik dalam kegiatan atau proses produksi (BPS, 2015). Data PMTB diidentifikasi dari Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran

seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada periode tahun 2011-2019 yang dirilis oleh setiap BPS Kabupaten/Kota

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X2) sebagai variabel bebas ke-2. UMK adalah upah yang berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Gubernur. Data besaran UMK setiap Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat selama periode tahun 2011-2019 diperoleh dari setiap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diterbitkan setiap tahun.
4. Tingkat pendidikan penduduk (IP) sebagai variabel bebas ke-3. Pada kajian ini variabel tingkat pendidikan penduduk menggunakan indeks pendidikan setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2011-2019 yang diperoleh dari Sirusa BPS. Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
5. Belanja Daerah (ABD) sebagai variabel bebas ke-4. Belanja adalah perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Data yang digunakan adalah nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2019 yang diperoleh dari Sirusa BPS.

Fungsi persamaan model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PTK = f(PMTB, UMK, IP, ABD)$$

Dalam kajian ini model dibentuk bentuk dalam bentuk logaritma, kecuali variabel IP yang telah memiliki nilai dalam bentuk persentase. Dengan demikian, model penyerapan tenaga kerja menjadi :

$$\ln PTK_{it} = \alpha + \ln \beta_1 PMTB_{it} + \ln \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 IP_{it} + \ln \beta_4 ABD_{it} + u_{it}$$

di mana: PTK_{it} adalah variabel Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota ke-i dan tahun ke-t; $PMTB_{it}$ adalah variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten/Kota ke-i dan tahun ke-t; UMK_{it} adalah variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota ke-i dan tahun ke-t; IP_{it} adalah variabel Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota ke-i dan tahun ke-t; ABD_{it} adalah variabel Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota ke-i dan tahun ke-t; u adalah variabel faktor gangguan.

Menurut Juanda dan Junaidi (2014) penggunaan metode data panel terdiri atas yaitu metode *Pooled Ordinary Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Untuk memilih yang paling tepat dari ketiga metode data panel tersebut dapat digunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow adalah untuk memilih yang lebih tepat antara penggunaan model PLS dan FEM. Sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk memilih yang lebih tepat antara penggunaan model FEM dan REM. Selain itu dalam metode data panel dilakukan pula uji klasik yang terdiri atas Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model yang tepat data panel faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota yang berada pada Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA periode tahun 2011-2019 dilakukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil dari Uji Chow menunjukkan Probabilitas F sebesar 0,0000 yang berada dibawah derajat kesalahan 5% (0,05) maka persamaan penyerapan tenaga kerja menggunakan *fixed effect*. Adapun hasil Uji Hausman menunjukkan Probabilitas Chi2 adalah sebesar 0,0000 yang berada dibawah derajat kesalahan 5% (0,05) sehingga model penyerapan tenaga kerja juga menggunakan *fixed effect*.

Selanjutnya model *fixed effect* pada persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di seluruh kabupaten/kota di provinsi Kawasan Segitiga REBANA tersebut diuji dengan asumsi klasik untuk memastikan model tersebut valid untuk dianalisis. Pertama, Uji Multikolinearitas untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Dari uji Multikolinearitas ini menunjukkan hanya variabel bebas PMTB dan ABD yang memiliki interkorelasi. Kedua adalah Uji Autokorelasi untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan tahun. Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan bahwa Probabilitas F sebesar 0,0349 atau berada dibawah derajat kesalahan 5% sehingga pada persamaan ini terdapat autokorelasi. Ketiga adalah Uji Heteroskedastisitas untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk

semua pengamatan pada model regresi linear. Dari hasil uji Heteroskedastisitas ini diketahui bahwa Probabilitas Chi2 berada diatas derajat kesalahan 5% sehingga pada persamaan ini terdapat heteroskedastisitas.

Dikarenakan terdapat permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas pada persamaan model dengan *fixed effect* tersebut maka digunakan model *Generalized Least Square* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang Termasuk dalam Kawasan Pengembangan Segitiga REBANA

In_PTK	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
In_UMK	0.188	0.117	1.60	0.11	-0.042	0.417	
In_PMTB	0.029	0.094	0.31	0.754	-0.154	0.213	
In_ABD	0.568	0.12	4.74	0	0.333	0.803	***
IP	-0.077	0.006	-12.36	0	-0.089	-0.065	***
Constant	2.196	1.458	1.51	0.132	-0.663	5.054	
Mean dependent var		13.102	SD dependent var			0.583	
Number of obs		63.000	Chi-square			727.013	
Prob > chi2		0.000	Akaike crit. (AIC)			-39.428	

*** $p < 0.01$. ** $p < 0.05$. * $p < 0.1$

Sumber : Hasil perhitungan, 2021

Dengan urutan langkah yang sama model persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dipilih dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil dari Uji Chow menunjukkan Probabilitas F sebesar 0,0000 yang berada dibawah derajat kesalahan 5% (0,05), sedangkan hasil dari Uji Hausman menunjukkan Probabilitas Chi2 adalah sebesar 0,0000 yang berada dibawah derajat kesalahan 5% (0,05). Dengan demikian model penyerapan tenaga kerja di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat juga menggunakan *fixed effect*.

Kemudian model *fixed effect* pada persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat diuji dengan Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi

dan Uji Heteroskedastisitas. Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan adanya interkorelasi pada variabel bebas PMTB dan ABD. Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi variabel yang ada di dalam model seiring perubahan tahun, hal ini dikarenakan Probabilitas F sebesar 0,0151 atau berada dibawah derajat kesalahan 5%. Sedangkan hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear dikarenakan Probabilitas Chi2 sebesar 0,7745 atau berada diatas derajat kesalahan 5% (0,05). Dengan demikian maka digunakan model *Generalized Least Square* untuk menentukan persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

In_penyerpantena g-a	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
In_pmtb_adhb	0.441	0.034	12.98	0	0.375	0.508	***
In_umk	-0.501	0.058	-8.67	0	-0.614	-0.388	***
In_abd	0.801	0.062	12.91	0	0.679	0.923	***
indekspendidikan	-0.017	0.003	-5.79	0	-0.023	-0.011	***
Constant	-2.826	0.913	-3.09	0.002	-4.615	-1.036	***
Mean dependent var		13.259	SD dependent var			0.787	
Number of obs		239.000	Chi-square			1967.840	
Prob > chi2		0.000	Akaike crit. (AIC)			41.316	

*** $p < 0.01$. ** $p < 0.05$. * $p < 0.1$

Sumber : Hasil perhitungan, 2021

Dari model persamaan *Generalized Least Square* pada Tabel 2 dan Tabel 3 dapat diinterpretasikan antara penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota yang masuk pada Kawasan Segitiga REBANA dan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pada Tabel 2 diketahui bahwa PMTB sebagai pendekatan nilai investasi di Kawasan Segitiga REBANA tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan jika membandingkan dengan Tabel 3, menunjukkan bahwa peningkatan investasi di Jawa Barat berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di setiap Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Segitiga REBANA selama 2011-2019 masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat.

Disisi lain dapat dimungkinkan pula investasi yang telah ada di Kawasan Segitiga REBANA belum dapat menyerap tenaga kerja secara masal. Berdasarkan kajian Astuti (2014) dan Jimika (2019) menunjukkan bahwa pengaruh investasi di Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA belum meningkatkan serapan tenaga kerja secara signifikan. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan jalan Tol Cikampek-Palimanan baru dapat menyerap tenaga kerja pada aspek konstruksi, jasa dan perdagangan akibat dampak pembangunan fisik infrastruktur dimaksud. Penyerapan tenaga kerja akibat Pembangunan BIJB Kertajati juga akibat semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian akibat semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara, pendirian pabrik dan pembangunan sarana non pertanian lainnya (Diskominfo Kab. Majalengka, 2018).

Bahkan berdasarkan penelitian (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa terdapat penurunan jumlah tenaga kerja pada beberapa rumah makan dan sentra perdagangan oleh-oleh di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) setelah terbangunnya Jalan Tol Cikopo-Pemalang. Sedangkan Iryana (2018) menyatakan bahwa dampak dari Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah terjadinya transformasi mata

pencaharian masyarakat sekitar dari sektor pertanian dan nelayan menjadi sektor industri.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Berdasarkan persamaan penyerapan tenaga kerja di Tabel 3, kenaikan UMK di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya kenaikan UMK selama tahun 2011-2019 menyebabkan menurunnya jumlah orang yang bekerja. Ketidakmampuan beberapa industri di Jawa Barat untuk memenuhi ketentuan UMK sebagai bagian dari biaya produksi menjadi alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beberapa penelitian yang mendukung hal ini antara lain dikemukakan oleh Gultom, (2003), Husaeni (2018) dan Pasha (2013). UMK yang tinggi juga menyebabkan enggannya investor untuk melakukan penanaman modal, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak dapat diserap. Merujuk pada pendapat Mankiw (2007) penurunan serapan tenaga kerja disebabkan kekakuan upah (*wage rigidity*) dimana upah tidak dapat berada diantara keseimbangan penawaran tenaga kerja sama dan permintaan tenaga kerja.

Namun jika melihat pada Tabel 2, UMK di Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Segitiga REBANA. Masih minimnya investasi dan struktur perekonomian yang masih ditopang oleh lapangan usaha primer seperti pertanian, menyebabkan UMK di Kawasan Segitiga REBANA tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, menjadi sebuah alasan yang tepat jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan UMK di Kawasan Segitiga REBANA sebagai sebuah keunggulan komparatif untuk menarik investor ke kawasan ini. Meskipun demikian Pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang dapat mensejahterakan tenaga kerja di Kawasan Segitiga REBANA tersebut.

3. Indeks Pendidikan

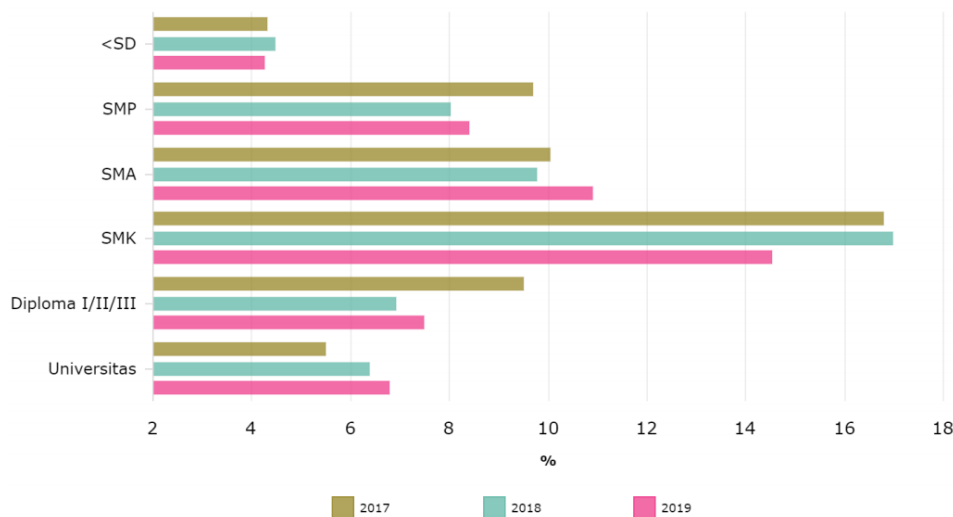
Indeks pendidikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di di Kabupaten/Kota yang masuk pada Kawasan Segitiga REBANA. Hasil analisis juga menunjukkan hal yang sama

terhadap seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan apabila indeks pendidikan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat meningkat maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Secara umum hal ini disebabkan tidak terpadunya antara peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja terdidik di Jawa Barat. Wardhana dkk. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja usia muda di Provinsi Jawa Barat maka kecenderungan untuk menjadi pengangguran usia muda pun lebih besar. Bahkan berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat (2019) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas di provinsi ini selalu meningkat setiap tahunnya.

Secara khusus untuk Kabupaten/Kota yang termasuk pada Kawasan Segitiga REBANA, rata-rata IPM di kawasan ini lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat. Maka kebijakan peningkatan IPM khususnya pada komponen Indeks Pendidikan di Kawasan Segitiga REBANA perlu diimbangi dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja serta pengembangan pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Oleh karena itu kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama industri yang akan berdiri di Kawasan Segitiga REBANA untuk meningkatkan IPM merupakan strategi yang tepat.



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, diolah oleh Katadata.Co.Id (2019)

4. Anggaran Belanja Daerah (ABD)

Berdasarkan model pada Tabel 2 dan Tabel 3, Anggaran Belanja Daerah (ABD) antara Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011-2019 mampu meningkatkan serapan tenaga kerja. Tentunya belanja daerah sebagai stimulus perekonomian, akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi di suatu wilayah, dan hal akan memicu permintaan tenaga kerja.

Hasil ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Ferdinan (2011) dengan melakukan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda data panel dengan *fixed effect* model menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Begitu pula kajian yang dilakukan Alisman (2018), dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat.

KESIMPULAN

1. Selama periode tahun 2011-2019, peningkatan PMTB di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja. Sedangkan PMTB di Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA tidak signifikan berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga kerja.
2. Selama periode tahun 2011-2019, kenaikan UMK di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat signifikan berpengaruh terhadap penurunan serapan tenaga kerja. Sedangkan UMK di Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA tidak signifikan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja.
3. Selama periode tahun 2011-2019, peningkatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat signifikan berpengaruh meningkatkan serapan tenaga kerja.
4. Selama periode tahun 2011-2019, peningkatan indeks pendidikan Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat signifikan berpengaruh terhadap penurunan serapan tenaga kerja. Maka merupakan strategi dan inovasi yang tepat dalam Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merencanakan implementasi penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri, pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia

kerja dan industri serta memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK).

SARAN

Rencana Pengembangan Kawasan Segitiga REBANA merupakan salah satu langkah tepat untuk dapat meningkatkan investasi dan serapan tenaga kerja di setiap Kabupaten/Kota pada wilayah tersebut. Oleh karena itu keunggulan komparasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA dibandingkan dengan Kawasan Industri lainnya di Jawa Barat perlu dipertahankan dan didukung oleh seluruh *stakeholder* ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja oleh dunia usaha.

Untuk dapat lebih meningkatkan serapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Segitiga REBANA perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang diprioritaskan untuk menstimulus peningkatan output produksi dan jasa serta penguatan belanja untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Terkait dengan sektor pendidikan, strategi yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Kawasan Segitiga REBANA adalah penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri, pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia kerja dan industri serta mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK).

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, A. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(2), 321–333.
- Astuti, S. P. (2014). *Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang*. Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020). *Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Penyusunan Komponen PMTB dan Perubahan Inventori pada PDB menurut Pengeluaran, 2015*. 2.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi @ www.bps.go.id*.
<https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- bappeda.jabarprov.go.id. (2020). *Ridwan Kamil dan Tujuh Kepala Daerah di Jabar Sepakat Kembangkan Rebana Metropolitan*.
<http://bappeda.jabarprov.go.id/ridwan-kamil-dan-tujuh-kepala-daerah-di-jabar-sepakat-kembangkan-rebana-metropolitan/>
- Bisnis.com. (2020). *Jelajah Segitiga Rebana III: Aerocity Kertajati Unggul di Konektivitas Darat dan Udara*.
<https://bandung.bisnis.com/read/20201026/550/1309824/jelajah-segitiga-rebana-iii-aerocity-kertajati-unggul-di-konektivitas-darat-dan-udara>. Diakses [24/06/21]
- Buchari, I. (2016). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1 Apr), 73–85.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. (2018). *Buku Profil Sosial Ekonomi Kabupaten Majalengka (Pembahasan Data IPM)*.
- Effendi, R. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sembilan Sektor Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 25–52.
- Ferdinan, H. (2011). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Rill Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat*. Skripsi, IPB (Bogor Agricultural University).
- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. In *New York* (4th Ed). The McGraw-Hill Companies.
- Gultom, R. (2003). *Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan Terhadap Pekerja dengan Alasan Perusahaan Merugi Menurut Pasal 164 Uu No 13 Tahun 2003 di PT. Merdi Mahayana (Studi Kasus Nomor: 93/G/2013/PHI/PN/BDG)*. Ubharjaya.
- Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/INOVASI Pengaruh*, 14(1), 36–43.
- Hidayat, M. H. (2018). *Dampak Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Pemalang Terhadap Perkembangan Perdagangan dan Rumah Makan di Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Brebes (Studi Kasus di Jalur Pantai Utara)*. Skripsi, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husaeni, F. (2018). Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220-yangbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi Kasus PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi. In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5). UIN Sunan Gunung Djati.
- Intradewa, I., & Natha, K. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Iryana, A. B. (2018). Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kecamatan Puskaneegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Jurnal Caraka Prabhu*, 2(1), 21–40.
- Jimika, F. (2019). *Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka The Impact Of Kertajati Airport On Economic Structure Of Majalengka*. 3(1), 11–21.
- Juanda, B., & Junaidi. (2014). *Ekonomika Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Issue May 2012). IPB Press.
- Katadata.co.id. (2019). *Pengangguran Universitas di Jawa Barat Semakin Meningkat*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/pengangguran-universitas-di-jawa-barat-semakin-meningkat>. [Diakses 06/08/21]
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48.

- Panjawa, J., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 48–54.
- Pasha, T. (2013). *Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi Tahun 2013 Dihubungkan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan di Kota Bekasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Unpad.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020. (2020). *Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030*.
- Rahmania, M., Wulandari, E. tria, & Purnama sari, W. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 114.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1–12.
- Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Journal Ekuilibrium*, 11(1), 31–37.
- Sofyan, I. (2019). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mendorong Investasi dan Ekspor*.
- Suaidah, I., & Cahyono, H. (2013). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–17. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3739>
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, 8, 195–211.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19.
- Tirtahardja, U., & Sulo, L. (2005). *Pengantar Pendidikan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development* (11th Ed).
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Ibrahim, Y. F. (2019). Pengangguran Usia Muda Di Jawa Barat (Menggunakan Data Sakernas). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 1049.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96–102. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/view/34054>
- Ziyadaturrofiqoh, Z., Zulfanetti, Z., & Safri, M. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi JAMBI. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Jambi*, 7(2), 188–202.